



LAPORAN KEGIATAN

7th MIKTA (MEXICO, INDONESIA, KOREA, TURKEY, AUSTRALIA) SPEAKERS' CONSULTATION

VIRTUAL
7 FEBRUARI 2022



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KEGIATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

7th MIKTA (MEXICO, INDONESIA, KOREA, TURKEY, AUSTRALIA)

SPEAKERS' CONSULTATION

(VIRTUAL)

(7 Februari 2022)

I. PENDAHULUAN

A. SUSUNAN DELEGASI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. (H.C). Puan Maharani	Ketua DPR RI F-PDI Perjuangan (A-188)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan keikutsertaan Ketua DPR RI dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual kali ini tercermin dalam pidato beliau yang fokus kepada beberapa isu, antara lain:

1. Tantangan global saat ini, dan masalah utama dunia yang harus diselesaikan segera (pandemi, perubahan iklim, dan ekonomi global).
2. Demokrasi diperlukan sebagai platform mendapatkan dukungan politik domestik.
3. Demokrasi saat pandemi mendapat tantangan, sehingga perlu resiliensi demokrasi.
4. Peran Parlemen dalam menjaga proses demokrasi, dan mendukung kerjasama internasional.
5. Mendorong peran Parlemen MIKTA sebagai bagian dari solusi masalah global.

C. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebagai persiapan substansi Delegasi DPR RI ke pertemuan dimaksud, TA BKSAP telah menyiapkan bahan-bahan masukan. Adapun untuk persiapan teknis, Sekretariat BKSAP DPR RI telah melakukan koordinasi dengan parlemen Australia sebagai tuan rumah.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

11.00 – 11.10	Pembukaan oleh Presiden Senat Australia
11.10 – 12.50	Statements oleh masing-masing Speaker (10 menit). Selanjutnya para Speaker boleh melakukan dialog interaktif (<i>optional</i>), berupa pertanyaan atau komentar (10 menit).
12.50 – 13.00	Penutupan

B. JALANNYA PERSIDANGAN

Pembukaan oleh Presiden Senat Australia – Honorable Senator Slate Brockman

Dalam pidato pembukaan, Ketua Senat Australia menyampaikan bahwa meskipun belum dapat bertemu secara langsung, kehadiran parlemen negara-negara anggota MIKTA dalam sidang virtual tahun ini merupakan testamen atas MIKTA. Sidang tahun ini merupakan upaya untuk membangun nilai-nilai bersama dan mendiskusikan berbagai tantangan. Ketua Senat Australia menyampaikan juga optimisme bahwa pandemi akan segera berakhir dan MIKTA akan dapat melakukan pertemuan secara fisik.

Sebagai implikasi dari pandemi, negara-negara masih menghadapi berbagai tantangan. Secara kolektif, negara-negara menghadapi disinformasi dan misinformasi serta polarisasi dan pengetatan regulasi yang dinilai membatasi kebebasan publik.

Di tengah berbagai tantangan, demokrasi dan parlemen yang resilien merupakan hal yang harus terus dipertahankan. Sebagai satu forum konsultasi, MIKTA memiliki nilai bersama dan kesamaan sikap dalam menghadapi tantangan global meskipun berasal dari negara dan benua yang berbeda. Hal ini menjadi modal dasar untuk kerjasama internasional.



***Presiden Senat Australia – Honorable Senator Slate Brockman
membuka pertemuan virtual sebagai tuan rumah pertemuan kali ini***

Selain tantangan, pandemi ini telah memberikan kesempatan bagi penguatan institusi parlemen. Setelah pandemi berakhir, parlemen diyakini akan bertransformasi menjadi institusi demokrasi yang tangguh dan progresif.

Selama kurun waktu 2020-2021, Parlemen Australia telah mereformasi cara kerja parlemen. Senat dan Dewan Perwakilan mengimplementasikan *physical distancing*. Parlemen melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi pertemuan dalam situasi kedaruratan, antara lain partisipasi melalui videolink. Berbagai UU disahkan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan bisnis. Parlemen juga membentuk Senate Select Committee on COVID-19. Selama masa pandemi, Senat melakukan 45 kali *hearings*. Komisi Scrutiny tetap bertemu secara regular dan melakukan tugas pengawasan. Pada tanggal 3 September Senat mengimplementasikan affirmative right. Berbagai pembaharuan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan prosedur parlemen dan meningkatkan resiliensi. Hal ini harus terus dipertahankan setelah pandemi berlalu.

Disinformasi menjadi tantangan bersama yang harus terus ditangani karena korosif untuk demokrasi dan mengikis kepercayaan rakyat atas lembaga parlemen. Parlemen Australia membentuk electoral integrity taskforce untuk menjamin integritas pemilihan umum. Parlemen juga membentuk kemitraan dengan industri untuk terus membenahi protokol selama COVID-19.

Kerjasama internasional merupakan juga salah satu hal krusial. Hal ini untuk memfasilitasi dialog, kolaborasi dan berbagi pengalaman.

Statements Oleh Masing-Masing Speaker

1. Meksiko – H.E. Karla Yuritz Almazan Burgos, Deputy Speaker of the Chamber of Deputies.

Pertemuan MIKTA ini memperteguh komitmen untuk berkolaborasi di antara negara-negara MIKTA. Pertemuan dilaksanakan di tengah situasi pandemi sehingga ideal untuk membahas peningkatan kerjasama multilateral bagi akses vaksin melalui COVAX. Meksiko saat ini tengah menuju target phase kedua vaksinasi 89 persen populasi. Meksiko juga tengah berdiskusi dengan Argentina *production sharing* Astra Zenneca dan uji coba Jonhson&Jonhson.



H.E. Karla Yuritz Almazan Burgos, Deputy Speaker of the Chamber of Deputies

Pandemi juga telah membawa dunia menuju situasi kemiskinan ekstrim dan menyebabkan pengangguran. Studi Bank Dunia terbaru menyatakan pertumbuhan global akan terhambat. Vaksinasi juga harus menyasar kawasan-kawasan termiskin.

Varian baru Omicron telah mengancam sistem kesehatan di Meksiko. Selain itu juga membawa ancaman bersama secara global terhadap rantai pasok, inflasi dan

meningkatkan utang LN. Selain itu terdapat tantangan berupa konflik geopolitik dan ancaman pemanasan global. Di tengah tantangan ini, Meksiko menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme. Meksiko siap bersama-sama menghadapi tantangan dan menegaskan komitmen atas keadilan gender dan tata kelola yang baik. Hal ini antara lain dilakukan sebagai amanat Konstitusi Meksiko untuk terus melindungi Hak Asasi Manusia.

Penerapan demokrasi di masa pandemi dilakukan melalui pengawasan atas anggaran dan legislasi serta penguatan sistem hukum. Meksiko saat ini tengah melakukan penguatan sistem hukum terutama untuk menanggulangi perdagangan senjata ilegal. Meksiko juga terus berupaya mengurangi korupsi, memastikan keadilan sosial dan kesetaraan gender, dan memastikan hak hak sosial terutama bagi kaum yang paling rentan. Meksiko menegaskan kembali komitmen bagi pencapaian SDGs terutama masyarakat yang damai dan inklusif. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan keterbukaan parlemen dan menampung aspirasi dari LSM. Parlemen juga terus mempromosikan instrumen baru untuk meningkatkan akuntabilitas eksekutif.

Komunitas internasional juga harus terus mendorong pengawasan atas multilateralisme melalui dialog dan praktik yang baik. Diplomasi parlemen secara bilateral juga terus dilakukan. Selain itu, parlemen harus memastikan profesionalisme lembaga dan bantuan teknis di setiap isu strategis serta menerapkan digitalisasi.

2. Indonesia – H.E. Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives.

Pada awal tahun 2022 ini, situasi dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Pandemi berlanjut dengan munculnya varian baru dan telah meningkatkan kembali kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai masalah sosial. Pemanasan global, kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati terus berlanjut. Eskalasi ketegangan diantara negara besar bahkan meningkat akhir-akhir ini.

Parlemen negara anggota MIKTA juga perlu untuk menjadi bagian dari solusi. Sebagai kelompok *middle power*, negara anggota MIKTA memiliki posisi unik untuk dapat (1) berperan konstruktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai permasalahan global, dan (2) menjembatani perbedaan posisi antar negara, termasuk antara negara maju dan berkembang, dan juga menurunkan ketegangan antar negara besar.



Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI memberikan intervensi terkait beberapa isu penting global

Pada awal tahun 2022 ini, beberapa hal utama yang perlu dilakukan bersama adalah: Pertama, menghentikan penyebaran virus COVID-19, diantaranya dengan melakukan pemerataan vaksin. Kedua, mengatasi tidak meratanya pemulihan ekonomi global terutama antara negara maju dan negara berkembang. Ketiga, mengatasi krisis perubahan iklim.

Permasalahan global yang dihadapi memerlukan solusi global. Solusi global ini memerlukan *platform* yang solid untuk memperkuat kerjasama internasional dan membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik. Demokrasi adalah *platform* untuk mendapatkan dukungan politik di dalam negeri.

Namun, disaat menghadapi pandemi, demokrasi di berbagai negara telah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari tertundanya pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara, terhambatnya kebebasan berkumpul, dan dibatasinya mobilitas sosial. Terlihat pula berkembangnya polarisasi, berita bohong (*fake news*) dan ujaran kebencian di masyarakat. Tantangan terhadap demokrasi tersebut memerlukan adanya resiliensi demokrasi.

Resiliensi demokrasi berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat. Resiliensi demokrasi juga

berarti *democracy delivers*, yaitu berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, dan berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

Pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektifitas pelaksanaan program pemulihan. Pada masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Parlemen memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dalam hal ini, Parlemen dapat berperan untuk memberi dukungan politik domestik bagi penyelesaian masalah internasional, dan melakukan implementasi berbagai kesepakatan internasional pada tingkat nasional dan lokal.

Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi. Parlemen harus tetap (1) Menghasilkan kerangka legislasi dan *governance* dalam mengatasi keadaan darurat secara transparan, (2) Memperkuat fungsi pengawasan termasuk *check and balance* untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel, dan (3) Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi. Inovasi-inovasi dilakukan termasuk di dalamnya (1) Pengembangan Sistem Informasi Legislasi yang *user-friendly*, (2) Peningkatan saluran pengaduan *online*, dan (3) Pengembangan mekanisme partisipasi publik *online* dalam proses legislasi RUU.

3. Korea – H.E. Park Byeong-Seug, Speaker of the National Assembly.

Langkah-langkah untuk menganggulangi COVID-19 menimbulkan kontroversi antara pembatasan hak individu dan demokrasi. Berdasarkan pengalaman selama pandemi, Korea berpandangan tidak menjadi masalah apabila demokrasi harus mundur selangkah.

Tingkat demokrasi suatu negara dapat diukur dari kekuatan parlemen. Selama 35 tahun, Korea Selatan terus berupaya untuk menuju demokrasi parsitipatif dan peningkatan pelibatan masyarakat. Di periode ini, parlemen Korea Selatan telah memperkenalkan mekanisme filibuster dan petisi elektronik. Petisi elektronik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan publik dalam UU. Hal ini dilakukan sembari mengurangi jumlah tanda tangan yang dibutuhkan untuk mengajukan suatu petisi. Parlemen Korea Selatan juga telah membentuk badan akuntabilitas. Parlemen Korsel merupakan parlemen unicameral yang terdiri dari 300 anggota.



H.E. Park Byeong-Seug, Speaker of the National Assembly

Terkait pandemi COVID-19, Majelis Nasional telah mendeklarasikan pandemi sebagai krisis nasional. Pengambilan suara di Rapat Pleno dan sidang-sidang dilakukan secara virtual. Di periode kepemimpinan ini, agenda legislatif disetujui dan dijalankan secara bipartisan. Hal ini untuk meminimalisir konflik.

Saat ini Korea Selatan banyak menghadapi tantangan terkait fake news. Oleh karena itu, telah dibentuk Komisi khusus untuk transformasi media yang berfungsi untuk memperbaiki distorsi opini publik. Selain itu Korea Selatan juga memiliki Komite persatuan nasional yang diisi figure dan tokoh politik terkemuka. Setelah mengadakan 48 kali pertemuan, salah satu kesimpulan yang didapat adalah struktur kekuasaan dimana pemenang mengambil semua kedudukan bukan merupakan struktur ideal dan menjurus pada sistem presidensial imperial. Dibutuhkan distribusi kekuasaan.

Korea Selatan juga memiliki Komisi agenda nasional jangka menengah dan panjang untuk menjamin kesinambungan agenda pembangunan. Selain perubahan iklim, Korsel juga menghadapi tantangan dari sisi jumlah populasi yang semakin menurun dan *aging population*.

Korea Selatan mendorong adanya demokrasi inklusif dan ekonomi pasar yang mendukung kaum marjinal. MIKTA merupakan mekanisme yang tepat dan

berharap MIKTA ke depan dapat memperkuat solidaritas dan mengambil kepemimpinan global.

4. Turki – H.E. Mustafa Sentop, President of the Grand National Assembly.

Dunia menghadapi pergeseran dan transformasi baru akibat pandemi. Demokrasi juga tengah mengalami krisis dan erosi kepercayaan publik. Pergeseran multilateralisme menjadi populisme dan xenophobia. Media sosial menghadirkan perubahan baru di sisi demokrasi perwakilan. Media sosial juga menawarkan saran baru untuk berkomunikasi dengan publik secara luas.



H.E. Mustafa Sentop, President of the Grand National Assembly

Setiap langkah transparansi dihadapkan pada hak asasi manusia oleh karena itu dibutuhkan penguatan demokrasi. COVID-19 dan implikasi krisis yang dihasilkan termasuk sistem partisipasi demokrasi secara virtual dan pemungutan suara secara jarak jauh. Hal ini dapat menimbulkan disinformasi dan *fake news* yang dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor pemerintah. Tentunya dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi dan membutuhkan kerjasama serta koordinasi internasional dalam aksi memberantas *fake news*.

Stigmatisasi semakin berkembang di tengah pandemi sehingga membuat masyarakat semakin mudah tersulut akan isu rasisme, Islamophobia dan xenophobia. Turki mengajak negara-negara MIKTA untuk menanggulangi rasisme, Islamophobia dan xenophobia.

Layanan kesehatan universal masih menjadi satu tantangan tersendiri. Selain itu dunia dihadapkan pada kurangnya vaksin di benua Afrika akibat distribusi vaksin yang tidak merata.

Parlemen telah dapat beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan tata kelola di tengah pandemi.

Migrasi merupakan salah satu tantangan internasional yang kurang mendapat perhatian dan tidak dibangun sebagai salah satu tantangan utama masyarakat internasional. Parlemen memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjembatani kesenjangan di antara komunitas.

Ke depan, parlemen harus lebih efektif. Demokrasi parlemen harus mendukung demokrasi di tingkat global. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki lembaga demokratis. Turki menyatakan kesiapan menjadi host sidang konsultasi MIKTA selanjutnya.

H.E. Mustafa Sentop, President of the Grand National Assembly menyampaikan pidato sebagai tuan rumah pertemuan selanjutnya. Pidato menggarisbawahi peran MIKTA untuk memperkuat kerjasama sebagai contoh dan teladan, menyampaikan apresiasi terhadap Australia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini dan mengharapkan kehadiran seluruh Ketua Parlemen negara-negara MIKTA di pertemuan selanjutnya di Turki.

III. PENGESAHAN *JOINT STATEMENT*

Sidang mengesahkan **7th MIKTA Speakers' Consultation Joint Statement** sebagai *outcome document* tahun ini. Outcome document disetujui dengan perubahan minor dari Parlemen Meksiko.

Joint statement memuat poin-poin penting yang menggarisbawahi peran MIKTA di tengah tantangan dunia yang semakin mengemuka seiring dengan berlanjutnya pandemi COVID-19. Dengan mempercepat perubahan struktural pada tatanan global yang mapan, parlemen perlu terus memberikan panduan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Maraknya *fake news*, misinformasi, disinformasi, dan polarisasi politik pasca pandemi membuat tugas pengawasan parlemen semakin sulit dan dapat merusak proses demokrasi. Demokrasi yang kuat membutuhkan parlemen yang kuat.

Parlemen negara anggota MIKTA mengakui perlunya parlemen untuk memperkuat proses dan konsisten mengawasi kebijakan pemerintah di era yang belum pernah

terjadi sebelumnya di mana kebutuhan memerlukan penilaian penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga negara.

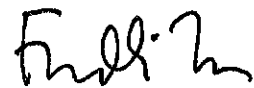
Parlemen negara-negara anggota MIKTA menegaskan kembali distribusi vaksin yang adil sangat penting untuk pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu sangat dibutuhkan solidaritas komunitas internasional.

Parlemen negara-negara anggota MIKTA harus mengambil peran kepemimpinan dalam menangani rasisme dan xenofobia untuk menuju dunia yang lebih aman bagi semua. Selain itu dibutuhkan perhatian lebih banyak lagi untuk kaum rentan secara sosial dan ekonomi, serta sering mengalami kerentanan akibat bencana.

IV. PENUTUP

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI menghadiri *7th MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey, Australia) Speakers' Consultation secara (VIRTUAL) pada 7 Februari 2022*. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2022
a.n. Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon
A-86

LAMPIRAN



MIKTA
A partnership for progress

7th MIKTA SPEAKERS' CONSULTATION

INFORMATION CIRCULAR

Parliament of Australia

VIRTUAL MEETING

Monday 7 February 2022

Date and format:

The 7th MIKTA Speakers' Consultation will be hosted by the Parliament of Australia on Monday 7 February 2022 as a virtual meeting.

MIKTA Speakers' Consultation Liaison Officer:

Please contact the MIKTA Speakers' Consultation Liaison Officer for any queries regarding the meeting:

Ms Fiona Way
Email: fiona.way.reps@aph.gov.au
Ph: + 61 2 6277 4400

Registration:

Please complete a registration form for your national representative. The registration form is provided at Annex A. Please return completed forms by return email to the MIKTA Speakers' Consultation Liaison Officer **by Friday 7 January 2022.**

Meeting Chair:

The meeting will be chaired by Senator the Hon Slade Brockman, President of the Senate, representing the Parliament of Australia.



Senator the Hon Slade Brockman
President of the Senate
Parliament of Australia

Senator the Hon Slade Brockman was first appointed to the Australian Senate in August 2017. Prior to his appointment, he was an established executive within the agribusiness sector and subsequently, was Chief of Staff to Senator the Hon Mathias Cormann – former Australian Minister of Finance and current Secretary-General of the Organisation for Economic Cooperation and Development. Thus, bringing a strong understanding of commerce and political nous to his current

time in the Senate.

He was elected President of the Senate in August 2021. In this capacity, he is currently Chair of the Senate Standing Committee on Appropriations, Staffing & Security.

Senator Brockman also recently served as the Government Deputy Whip of the Senate, in addition to being Chair of the Senate Economics Legislation Committee and Chair of the Select Committee on Multi-jurisdictional Management & Execution of the Murray Darling Basin Plan.

Senator Brockman’s policy interests include areas in agribusiness, the financial services industry, mining and resources sectors, along with issues of sound economic governance and fair democratic processes.

In addition to his Senate responsibilities, Senator Brockman remains active in the business community. He divides his time between his home base of Perth, Western Australia and the capital city of Canberra, along with time spent on the Brockman family farm in the picturesque southwest region of Western Australia.

He holds a Bachelor of Laws and First Class Honours in Political History.

Program

Monday 7 February 2022

Timings are in Australian Eastern Daylight-Saving Time (AEDT)

UTC/GMT + 11

Time	Session
15:00 to 15:10	Opening and welcome
15:10 to 16:50	Statements by Speakers (10 mins each) <i>*Followed by opportunity for 10 mins discussion</i>
16:50 to 17:00	Declaration of Joint Statement and Closing

Theme:

Effective parliaments supporting democracy

During the last year, parliaments have shown they are capable of adapting very quickly to support national responses to global problems.

As leaders of parliamentary institutions, we must respond to threats to democratic governance, ensure parliamentary resilience and set strong parliamentary culture.

Under this broad theme, MIKTA parliaments are invited to reflect on current and emerging challenges faced by parliaments as institutions of representative democracy.

Meeting format:

Each Speaker is invited to make a 10 minute statement on the theme. At the conclusion of their statement, Speakers may ask questions or make comment after seeking recognition from the Chair. A total of 10 minutes has been allocated for discussion following each statement.

Statement Abstracts:

An abstract of each statement is requested in advance of the meeting to inform the Joint Declaration. Ms Fiona Way, the MIKTA Speakers' Consultation Liaison Officer, will contact secretariat representatives to discuss. Abstracts will be required **by Monday 17 January 2022.**

Joint Statement:

At the conclusion of proceedings, Speakers will adopt a Joint Statement. A draft statement will be circulated by Monday 24 January 2022.

Virtual platform and testing arrangements:

The virtual meeting will be conducted via Cisco Webex.

Arrangements for technical testing will be provided to secretariat contacts in the week beginning Monday 10 January 2022.

Language and Interpretation:

The official language of the MIKTA Speakers' Consultation is English. Simultaneous interpretation will be facilitated using the *Congress Rental Network* application, a white labelled version of *Interprefy*. Further details will be provided in advance of scheduled testing.

Summary of Milestone Dates:

Friday 7 January 2022	Registration form to be submitted for each national representative
Friday 14 January 2022	Arrangements for technical testing circulated
Monday 17 January 2022	Statement abstracts to be submitted
Monday 24 January 2022	Draft Joint Statement circulated for comment
Friday 28 January 2022	Comments on draft Joint Statement to be submitted
Monday 7 February 2022	7 th MIKTA Speakers' Consultation held



PARLIAMENT OF AUSTRALIA

PRESIDENT OF THE SENATE
SENATOR THE HONOURABLE SLADE BROCKMAN

H.E. Puan Maharani
Speaker of the House of Representatives
Republic of Indonesia

Your Excellency

Australia is scheduled to host the 7th MIKTA Speakers' Consultation. While it had been hoped that Australia could host the MIKTA Speakers' Consultation in-person at the end of this year, regrettably, continued uncertainty over travel arrangements to Australia will not make this possible.

The Australian Parliament remains strongly committed to MIKTA as an important forum for our legislatures to meet and discuss matters of common interest. Accordingly, I propose to host the 7th MIKTA Speakers' Consultations as a virtual meeting on Monday 7 February 2022 before the chair position rotates to Turkey.

This year, the leaders of MIKTA countries released a joint statement reiterating their collective commitment to democracy and multilateral collaboration. As leaders in our national legislatures, we have a significant role to perform in building consensus on issues important to our regions and in ensuring good democratic governance. Accordingly, the theme of the 7th MIKTA Speakers' Consultations will be:

Effective Parliaments supporting Democracy

Further information on the theme and meeting arrangements is provided in the attached Information Circular.

I sincerely hope that you will be able to participate in these discussions.

Yours sincerely

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Slade Brockman', with a long horizontal flourish extending to the right.

SLADE BROCKMAN

17 December 2021